

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Cetakan Keempat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Asshiddiqie, Jimly. Hukum Acara Pidana Pemilu, (Jakarta: Konstitusi Press, 2019).
- Azisa, Nur. "Penyertaan dan Pembantuan". ed. Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2015, *Hukum Pidana Materiil & Formil*, Jakarta, USAID, The Asia Foundation, dan Kemitraan.
- Butt, Simon & Tim Lindsey, Indonesian Law, (Oxford: Oxford University Press, 2018).
- Chazawi, Adami. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah, Andi. 2021, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ilyas, Amir. ed. Andi Maulana Mustamin, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta, Rangkang Education.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, 2018, *Asas-asas hukum pidana dan penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, ed. 2, Cet. 4, Sinar Grafika, Jakarta.
- Manan, Bagir. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill Co.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Diah Sulistyanti RS, 2020, *Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP Nasional*, Universitas Semarang Press, Semarang.
- Raharjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.

- Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Cetakan Kedua. Jakarta: Aksara Baru.
- Santoso, Topo. Hukum Pidana Pemilu, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Soekanto, Soerjono. 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno dan Pitlo, 2013, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

### **Jurnal Ilmiah**

- Amin, Fakhry dan Getah Ester Hayatulah. 2024. Politik Hukum Pengaturan Kampanye Berbasis Keadilan dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, Volume 14 Nomor 1, hlm. 1-12.
- Bambang S., Setyadi S., dan A. Darmawan. 2021. Penanganan tindak pidana pemilu dalam sentra penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu). *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Volume 2 Nomor 3, hlm. 311-321.
- Marcus Priyo Gunarto. 2009. "Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan". *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 21 Nomor 1, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Mirzana, Hijrah Adhyanti, Andi Muhammad Aswin Anas, dan Aditya Dwi Rohman. 2024. Current Regulations And Anticipations On Criminalizing Black Campaigns For The 2024 Regional Head Elections. *Diponegoro Law Review*, Volume 9 Nomor 2, hlm. 258-276.
- Nasution, L. 2017. Pemilu dan Kedaulatan Rakyat. *ADALAH*, Volume 1 Nomor 9b, hlm. 83-98.
- Prasetyoningsih, Nanik. 2014. Dampak Pemilihan Umum Serentak bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, Volume 21 Nomor 2, hlm. 245-258.

### **Skripsi**

- Cahyo, Dwi. 2019. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kampanye Hitam (Black Campaign) Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Media Sosial. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Darma, Ilham Tio. 2021. Upaya Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Tentang Pelanggaran Larangan Kampanye (Studi Penelitian Bawaslu Kota Medan). Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Pancabudi, Medan.
- Fadhil, Andi Muhammad. 2019. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kampanye di Luar Jadwal Pemilu (Studi Putusan Nomor

24/Pid.Sus/2019/PN Mks). Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9)

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gto.

### **Sumber Online**

ICW. 2024. "Kecurangan Pemilu 2024: Temuan Pemantauan dan Potensi Kecurangan Hari Tenang, Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara". Diakses dari <https://antikorupsi.org/id/kecurangan-pemilu-2024-temuan-pemantauan-dan-potensi-kecurangan-hari-tenang-pemungutan-penghitungan>, pada 20 November 2025

Kompas.com. 2023. "Mengganggu dan Menghalangi Kampanye Pemilu Bisa Dipenjara 1 Tahun". Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/19/08000091/mengganggu-dan-menghalangi-kampanye-pemilu-bisa-dipenjara-1-tahun>, pada 28 Juni 2025.

Tempo.co. 2024. "Bawaslu Terima 1.620 Laporan dan 351 Temuan Dugaan Pelanggaran Masa Kampanye Pilkada 2024". Diakses dari <https://www.tempo.co/politik/bawaslu-terima-1-620-laporan-dan-351-temuan-dugaan-pelanggaran-masa-kampanye-pilkada-2024-1168978>, pada 28 Juni 2025.